

8 Artikel Hukum Internal tentang Kejaksaan

Tanggal penyusunan: 27 Desember 2025

1. Pembinaan

Jenis Artikel: Internal

Kategori: Pembinaan

Judul Peraturan (Dasar): Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan ini menjadi “payung operasional” pembinaan kompetensi SDM Kejaksaan melalui mekanisme pendidikan dan pelatihan yang terstandar—mulai dari perencanaan kebutuhan diklat, penyelenggaraan, tata tertib, evaluasi hasil belajar, hingga administrasi pelaporan—dengan tujuan memastikan peningkatan profesionalisme aparatur berjalan konsisten, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta agenda reformasi birokrasi.

2. Pengawasan

Jenis Artikel: Internal

Kategori: Pengawasan

Judul Peraturan (Dasar): Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa

Peraturan ini mengatur kerangka kerja Majelis Kehormatan Jaksa sebagai perangkat pengawasan etik dan kehormatan profesi, termasuk komposisi, kewenangan, tata cara sidang, pembuktian, serta bentuk rekomendasi/putusan, sehingga penanganan dugaan pelanggaran perilaku jaksa dapat dilakukan lebih tertib, transparan secara prosedural, dan memberi kepastian internal mengenai langkah pembinaan atau penegakan disiplin.

3. Pidana Umum

Jenis Artikel: Internal

Kategori: Pidana Umum

Judul Peraturan (Dasar): Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan ini memberi pedoman penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana tertentu dengan menekankan pemulihan (bukan sekadar penghukuman), melalui syarat dan tahapan yang jelas—mulai dari penilaian kelayakan, fasilitasi perdamaian, dokumentasi kesepakatan, hingga mekanisme pengendalian dan persetujuan—agar penghentian penuntutan tetap akuntabel, terukur, dan tidak berubah menjadi “jalan pintas” yang rawan disalahgunakan.

4. Pidana Khusus

Jenis Artikel: Internal

Kategori: Pidana Khusus

Judul Peraturan (Dasar): Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Peraturan ini memandu tata kelola administrasi dan teknis penanganan tindak pidana khusus (misalnya korupsi dan rumpun perkara khusus lainnya) dengan menstandarkan alur kerja, format administrasi, pengendalian proses, dan koordinasi antarsatuan kerja, sehingga penanganan perkara lebih rapi, terdokumentasi, mudah diaudit, serta mengurangi ruang ‘kerja improvisasi’ yang sering memunculkan inkonsistensi antarwilayah.

5. Pidana Militer

Jenis Artikel: Internal

Kategori: Pidana Militer

Judul Peraturan (Dasar): Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan ini memperjelas struktur organisasi dan tata kerja yang memuat fungsi pidana militer (termasuk penguatan peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer/JAMPIDMIL) sehingga koordinasi teknis penuntutan oleh oditurat, penanganan perkara koneksitas, serta dukungan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang pidana militer memiliki landasan kerja internal yang lebih tegas, terintegrasi, dan seragam untuk dioperasionalkan oleh jajaran.

6. Pemulihan Aset

Jenis Artikel: Internal

Kategori: Pemulihan Aset

Judul Peraturan (Dasar): Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan ini memperbarui pedoman pemulihan aset agar kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana dapat dilakukan lebih efektif, cepat, dan seragam, dengan menekankan pentingnya pemetaan aset sejak awal, penguatan koordinasi, serta ketertiban administrasi agar tujuan pemulihan kerugian negara/korban lebih realistis dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Intelijen

Jenis Artikel: Internal

Kategori: Intelijen

Judul Peraturan (Dasar): Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan ini menata administrasi intelijen Kejaksaan sebagai satu sistem yang seragam—mencakup tata naskah, pencatatan, pengkodean, pelaporan, pengelolaan dokumen/produk intelijen, dan pengamanan informasi—agar fungsi intelijen mampu memberi peringatan dini dan dukungan penegakan hukum tanpa mengorbankan ketertiban administrasi, jejak audit, serta perlindungan kerahasiaan yang menjadi kunci kerja intelijen.

8. Perdata dan Tata Usaha Negara

Jenis Artikel: Internal

Kategori: Perdata dan Tata Usaha Negara

Judul Peraturan (Dasar): Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan ini menjadi pedoman operasional bidang DATUN untuk memastikan kewenangan Kejaksaan—mulai dari penegakan hukum perdata/TUN, bantuan dan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, tindakan hukum lain, hingga pelayanan hukum—dijalankan dengan asas, ruang lingkup, dan tata cara yang konsisten, sehingga kualitas layanan Jaksa Pengacara Negara meningkat dan risiko salah langkah prosedural bisa ditekan.